

IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Haryo S. Martodirdjo¹

Pembahasan tentang Wawasan Kebangsaan merupakan suatu hal yang penting dan mutlak harus selalu dilakukan secara terus menerus sejalan dengan dinamika proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan dapat dianggap sebagai ruh atau jiwa atau semangat dari kehidupan berbangsa yang tentu saja akan mewarnai dan bahkan ikut menentukan eksistensi dan maju mundurnya suatu negara. Negara yang antara lain ditandai oleh kesatuan teritori boleh susut atau hancur tetapi dengan jiwa dan semangat kebangsaan yang tetap berkobar dengan daya juang tinggi maka eksistensi suatu bangsa tetap dapat dipertahankan dan diakui oleh bangsa-bangsa lain. Sebaliknya jika jiwa dan semangat kebangsaan dari suatu bangsa telah luntur atau apalagi telah hilang, maka pada hakikatnya eksistensi dari bangsa dan negara yang bersangkutan telah tidak ada lagi, walaupun barangkali secara fisik administratif bangsa dan negara tersebut masih berdiri.

Pancasila sebagai dasar Negara dan sekaligus juga sebagai falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia pada dasarnya dapat merupakan instrument utama dalam menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan Indonesia. Sebagai instrumen Pancasila akan selalu melekat sepanjang masa sejalan dengan keberadaan dan gerak pasang naik dan pasang turunnya kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik dalam masing-masing sila maupun dalam kesatuan dari kelima sila, memiliki daya mengikat (daya sentripetal) yang luar biasa. Sebaliknya dimensi praksis Pancasila dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang secara faktual mengikuti pluralitas budaya bangsa Indonesia memiliki daya menyebar (daya sentrifugal) yang sama kuatnya. Tidak dapat disangkal

¹ Guru Besar Antropologi, Universitas Padjadjaran

Apa dan Arti Penting Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang atau cara melihat eksistensi diri suatu bangsa baik dalam konteks keberadaannya sebagai entitas yang utuh dan bulat maupun dalam konteks hubungan timbal baliknya dengan lingkungan sekitar. Bagaimana suatu bangsa memandang dan memaknai diri baik dari segi proses pembentukannya maupun dari berbagai faktor berdasarkan pengalaman dan bahkan dari segi tujuan serta harapan dan cita-cita yang hendak dicapai. Wawasan atau cara pandang ini akan menghasilkan adanya semangat dan rasa kebangsaan sebagai kekuatan atau daya juang utama dalam menjaga dan mempertahankan identitas dan harga diri bangsa yang bersangkutan terutama dalam rangka hubungan dan pergaulan antar bangsa-bangsa. Setiap bangsa memiliki cara pandang atau wawasannya sendiri-sendiri tentang siapa jati dirinya, bukan hanya dalam konteks proses politik tetapi secara menyeluruh menyangkut totalitas proses kehidupan (sosial, ekonomi, seni, moral, spiritual, dsb.) dan bahkan menyangkut juga proses organis dan psikis keseluruhan warga yang terikat di dalamnya.

Inti dari pengertian kebangsaan terletak pada kata 'bangsa'

yang baik dalam dunia akademis maupun dunia praksis hingga sekarang masih selalu terjadi perbedaan pendapat dan pandangan. Dalam beberapa buku tentang perjuangan dan kebangkitan bangsa Indonesia sering dikemukakan dan dibandingkan empat pendapat dan pandangan tentang bangsa yang jika diperhatikan keempat-empatnya mengandung adanya titik-titik yang saling melengkapi dan saling menjelaskan yaitu pendapat dan pandangan dari Wenest Renan, Otto Bauer, Muhammad Hatta, dan Soekarno. Ernest Renan pada intinya mengartikan bangsa itu '*sebagai jiwa yang mengandung kehendak bersatu*'. Sedangkan Otto Bauer mengartikannya sebagai '*satu kesatuan perangai yang timbul karena persamaan nasib*'. Muhammad Hatta mengartikan bangsa sebagai '*himpunan masyarakat yang memiliki keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu karena percaya akan persamaan nasib dan tujuan*'. Yang keempat, Soekarno, memperluas pengertian bangsa sebagai '*himpunan masyarakat yang bersama-sama tinggal di dalam suatu wilayah yang merupakan satu kesatuan geopolitik*'. Menurut Tim Sosialisasi wawasan Kebangsaan yang dibentuk Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (2004: 17-18) secara umum da-

pat dikemukakan bahwa ada empat kriteria yang pada hakikatnya menandai suatu bangsa, yaitu: (1) adanya kehendak secara sadar (keinsyafan) dari unsur masyarakat untuk bersatu, (2) memiliki tujuan hidup bersama (masa depan yang bahagia sejahtera yang akan dinikmati bersama), (3) memiliki latar belakang atau pengalaman sejarah yang sama, dan (4) ada wilayah yang menjadi satu kesatuan ruang hidup (kesatuan teritori).

Pembahasan tentang wawasan kebangsaan akan lebih ditekankan pada fenomena bangsa walaupun tentu saja tidak akan dan memang tidak dapat dipisahkan dari dimensi kenegaraan. Dalam pada itu sebagaimana telah disinggung di bagian depan, berbicara tentang bangsa maka pembahasan akan terpusat pada benturan antara konsepsi dan kenyataan empirik tentang fenomena budaya. Di kalangan ahli antropologi budaya, antara lain Honigman (1950) dan Koentjaraningrat (1959), secara konseptual dikenal bahwa kebudayaan terbagi atas tiga wujud atau aspeknya yaitu aspek *thinking* atau tata kelakuan/perilaku, aspek *doing* atau kelakuan/perilaku, dan aspek *having* atau hasil kelakuan/perilaku. Dalam konteks keberadaan dan dinamika bangsa sebagai fenomena budaya maka

posisi dan peranan wawasan kebangsaan berada pada tataran aspek *tata kelakuan* yang bersifat abstrak yaitu sebagai sistem nilai budaya yang berada pada lingkaran paling dalam sebagai pedoman perilaku seluruh anak bangsa dalam kehidupan bernegara. Kedudukan dan peranan wawasan kebangsaan bersifat sentral dan mutlak diperlukan. Dia adalah sekaligus sebagai ruh atau jiwa dan semangat dari eksistensi dan dinamika bangsa dan Negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, ibaratnya sebagai sebuah titik api (*focus*), maka sinar yang memancar dari wawasan kebangsaan akan menyinari dan mewarnai pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya.

Universalitas dan Kekhasan Wawasan Kebangsaan Indonesia

Wawasan kebangsaan merupakan salah satu dari sejumlah konsepsi nasional yang lahir dan berkembang sejalan dengan eksistensi dan dinamika bangsa dan Negara Indonesia. Sebagian besar konsepsi nasional tersebut lahir bersamaan atau setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, antara lain konsepsi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, wawas-

an nusantara, pembangunan nasional, dsb. Sedangkan konsepsi tentang wawasan kebangsaan, bersamaan dengan konsepsi-konsepsi tentang cinta tanah air, kemerdekaan, semangat '*bhinneka tunggal ika*', dan sebagainya telah lahir dan berkoobar sejak jauh sebelum proklamasi kemerdekaan.

Konsepsi wawasan kebangsaan merupakan satu rahmat dan karunia dari Yang Maha Kuasa bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus disyukuri dan sekaligus dijaga keberadaannya hingga waktu yang tidak terbatas. Lahir dan bertumbuhkembangnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga sekarang yang sangat fluktuatif tidak lepas dari dinamika semangat yang terkandung dalam wawasan kebangsaan tersebut. Wawasan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam proses panjang yang berakar kuat pada tuntutan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan terhadap kesewenang-wenangan dan dominasi penjajah atas totalitas kehidupan bumi putera. Timbul bibit-bibit perjuangan pada sepelempat bagian terakhir abad ke-19 yang mulai menampakkan bentuknya yang nyata sebagai pergerakan secara terorganisasi pada awal abad ke-20 melalui berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Perwu-

judan semangat kebangsaan sebagai gerakan kebangsaan yang bersifat nasional semakin jelas melalui Sumpah Pemuda (1928) yang kemudian mencapai titik kulminasinya pada pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Keseluruhan gerakan kebangsaan Indonesia tersebut jelas sekali landasan moralitas dan pijakannya pada martabat kemanusiaan (*human dignity*) dan hak-hak asasi manusia yang bersifat universal.

Wawasan kebangsaan Indonesia yang merupakan ruh atau jiwa dan semangat perjuangan melalui sejarah pergerakan nasional yang panjang, secara kurang lebih telah terkristalisasi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Soerjanto Poespowardojo (2005) mengemukakan bahwa Pembukaan UUD 1945 dalam satu kesatuan arti dari keempat alinea yang terkandung di dalamnya menggambarkan tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita luhur yang sangat manusiawi bersama bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Dalam alinea pertama : "*Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.*" tercermin visi dan ke-

sadaran seluruh anak bangsa tentang hak kemerdekaan atas dasar eksistensinya sebagai manusia. Pernyataan ini menunjukkan impian bangsa Indonesia yang pada hakekatnya berakar kuat pada harkat dan martabat manusia yang bersifat universal. Alinea ketiga : *"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."* mencerminkan cita-cita moral bangsa Indonesia yang menginginkan berkehidupan kebangsaan yang bebas. Bebas dari segala penderitaan, penindasan, kesengsaraan, kemiskinan, keteringgalan, rasa takut, dan sebagainya, di samping bebas untuk memiliki dan menyatakan pendapat dan sebagainya, atau dengan singkat bebas untuk mengaktualisasikan diri. Alinea kedua : *"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."* menunjukkan pembenaran dan legitimasi atas usaha-usaha bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri dari penjajahan dan selanjutnya mengisi ke-

merdekaan melalui berbagai tindakan dalam proses humanisasi. Sedangkan alinea keempat: *"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"* menunjukkan prinsip dasar keberadaan negara sebagai wadah kelembagaan serta keberadaan pedoman pembebasan bangsa melalui pengimplementasian dasar negara (Pancasila).

Dalam pada itu wawasan kebangsaan Indonesia tetap menampilkan suatu cara pandang tentang eksistensi dan jati diri kebangsaan yang memiliki spesifikasi dan keunikan yang khas

Indonesia. Latar belakang dan pengalaman perjalanan panjang perjuangan anak bangsa dalam menggapai cita-cita menuju ke alam kemerdekaan melahirkan ikatan kejiwaan dan semangat kebangsaan yang luar biasa. Kondisi obyektif kewilayahan geografis dan kesukubangsaan yang sangat beranekaragam dan kompleks menjadikannya sebagai tantangan yang berkelanjutan dan tidak pernah kering. Selanjutnya visi dan misi negara yang terbentuk melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan sumber inspirasi dan semangat kejuangan yang seolah abadi dalam proses pengisian kemerdekaan melalui pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Embrio perjuangan dan pergerakan nasional bangsa Indonesia menuju terbentuknya negara Indonesia merdeka telah lahir bersamaan dengan dikenalkan dan diterapkannya politik etis oleh pemerintah penjajah Belanda bagi bumi putera di Hindia Belanda pada seperempat abad terakhir abad ke-19. Politik etis yang intinya berkisar pada gerakan: edukasi - irigasi - kolonisasi, diramalkan seolah-olah sebagai penanaman 'bom waktu' oleh pemerintah kolonial Belanda yang pada saatnya nanti

akan meledak dan membakar serta memusnahkan sistem penjajahan itu sendiri. Terlepas dari adanya anggapan bahwa pelaksanaan ketiga program tersebut pada akhirnya toh untuk kepentingan dan keuntungan pemerintah kolonial Belanda sendiri, terutama dari segi keuntungan secara ekonomi, tetapi terutama dari pelaksanaan program edukasi atau pendidikan secara nyata telah melahirkan kelompok-kelompok anak pribumi yang merupakan kaum intelektual dengan pandangan-pandangan baru khususnya pandangan yang mengandung bibit-bibit liberalisasi dan demokrasi. Mereka inilah yang merintis dan menggalang berbagai kekuatan moral penduduk bumi putera yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan nyata secara terorganisasi dan terarah, yang mengandung dan menerapkan semangat 'modernisme Barat' tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur budaya tradisi nenek moyang. Para perintis tersebut umumnya adalah pemuda-pemuda elitis keturunan kaum bangsawan dan priyayi yang mendapat kesempatan dan prioritas untuk mengenal baca-tulis dan mengikuti pendidikan berbagai pengetahuan Barat, baik dalam kelas-kelas pribumi tersendiri maupun bercampur bersama anak-anak kulit putih. Da-

pat diperkirakan adanya diskriminasi dalam pelaksanaan politik etis khususnya di bidang pendidikan ini yang dilakukan pemerintah penjajah. Tetapi justru karena yang mendapat kesempatan belajar serta mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai instrumen dan substansi dalam olah pikir atau daya nalar itu umumnya anak-anak kaum bangsawan dan priyayi, maka terjadilah perpaduan antara ajaran-ajaran modernisme Barat dengan nilai-nilai luhur kebudayaan lokal. Umumnya anak-anak kaum bangsawan dan priyayi sejak kecil telah lebih dahulu mendalami dan bahkan menginternalisasi berbagai tradisi dan nilai-nilai budaya leluhur. Terbuka peluang untuk adanya proses seleksi dalam pengintegrasian berbagai pemahaman dan ajaran ataupun ideologi-ideologi baru melalui kegiatan pendidikan tersebut dengan nilai-nilai budaya leluhur.

Lahirnya gerakan kebangkitan kaum pribumi dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang bahkan diakui sebagai awal kebangkitan nasional bagi seluruh anak bangsa Indonesia, tidak terlepas dari rintisan para pemuda elitis tersebut. Tanggal 20 Mei 1908 dinyatakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, secara nyata merupakan gerakan kebangsaan

yang mengandung semangat dan rasa kebangsaan dengan arah dan tujuan bersama menuju tercapainya cita-cita menjadi bangsa yang merdeka. Gerakan kebangkitan nasional ini menjadi lebih jelas dan lebih nyata nuansa kebangsaannya setelah dicetuskan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh kelompok-kelompok pemuda dari berbagai suku bangsa di nusantara (Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Sumatra, dan sebagainya) yang secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan eksistensi bangsa dan negara Indonesia yang merdeka sebagai cita-cita luhur yang diperjuangkan. Gerakan yang mengandung cita-cita, jiwa, semangat, dan rasa kebangsaan ini mencapai titik klimaks dan kulminasinya pada proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dengan terwujudnya secara formal bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti, bahkan justru mulai memasuki babakan baru yang jauh lebih sulit dan lebih kompleks permasalahannya. Ibarat pepatah mengatakan bahwa mendapatkan atau memperoleh sesuatu itu tidak mudah tetapi jauh lebih sulit lagi untuk mempertahankan apa yang telah diperoleh tersebut. Dalam lima tahun pertama masa kemer-

dekaan seluruh bangsa Indonesia dihadapkan pada kondisi yang sulit dan kritis dalam suasana perang mempertahankan kemerdekaan dari segala ancaman dan gangguan terutama dari kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah. Setelah kemerdekaan dan pengakuan internasional tercapai sepenuhnya (27 Desember 1949) perjuangan bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan dan untuk melaksanakan pergaulan bangsa-bangsa di dunia melalui berbagai langkah dan pelaksanaan program-program di bawah koridor pembangunan nasional mengalami pasang surut dan lika liku perjalanan yang luar biasa. Keseluruhannya bergerak dinamis dalam semangat kebangsaan yang terpateri di dalamnya membentuk dan mewarnai wawasan kebangsaan yang unik dan khas bagi seluruh anak bangsa Indonesia.

Konsepsi nasional tentang Wawasan Nusantara terkait erat dengan dinamika wawasan kebangsaan Indonesia. Wawasan Nusantara yang disebut juga sebagai landasan visional bagi seluruh komponen bangsa Indonesia merupakan formula impian jangka panjang seluruh anak bangsa untuk mewujudkan kondisi ideal berupa persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dua hal pokok sebagai inti Wawasan Nusantara adalah pemahaman tentang 'nusantara' dan 'kenusantaraan' yang antara keduanya bersifat saling menjelaskan dan saling melengkapi sehingga terwujud satu konsepsi Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan makna. Jika makna 'nusantara' ditekankan pada kesatuan wilayah maka 'kenusantaraan' ditekankan pada kesatuan kehidupan yang berada di dalam kesatuan wilayah tersebut. Dalam perspektif geopolitik keduanya dikenal sebagai dua dimensi pemikiran yaitu dimensi 'kewilayahan' dan dimensi 'kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara'. Keduanya sama-sama saling mendukung sehingga tercipta konsepsi Wawasan Nusantara sebagai visi bangsa Indonesia dalam memandang jauh ke depan, sekaligus menandai kekhasan Wawasan Kebangsaan Indonesia di antara bangsa-bangsa di dunia ini.

Kondisi obyektif bangsa Indonesia yang terdiri atas puluhan atau bahkan ratusan kelompok suku dan sub-sub suku bangsa merupakan warisan leluhur yang masing-masing akarnya telah tertanam ratusan tahun sebelumnya. Kondisi ini telah disadari sejak awal dan bahkan dijadikan modal dasar oleh para

bapak bangsa dalam rangka menggalang dan membina persatuan bangsa Indonesia sepanjang masa. Motto dan semangat 'Bhinneka Tunggal Ika' telah sejak lama diangkat dan digunakan secara efektif sebagai instrumen dalam proses pembinaan persatuan bangsa. Ia merupakan sesanti dalam bahasa Jawa Kuna pada jaman kerajaan Majapahit yang secara etimologis kurang lebih berarti 'yang dua atau yang banyak itu adalah yang satu itu', atau sebaliknya 'yang satu itu adalah yang dua atau yang banyak itu'. Wawasan Kebangsaan Indonesia terbentuk berdasarkan dan berakar pada pandangan 'multikulturalisme' yang mengandung dua pengertian yaitu : pengakuan terhadap kenyataan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kebudayaan yang bersifat plural, dan suatu ajaran atau doktrin yang menyangkut politik terhadap kenyataan faktual tentang masyarakat Indonesia yang pluralistik. Dalam perspektif wawasan kebangsaan Indonesia fenomena keanekaragaman budaya masyarakat adalah suatu kenyataan sosial yang harus dihadapi dengan rasa syukur, dan bukannya untuk dihindari atau bahkan untuk dihilangkan.

Wawasan Kebangsaan Indonesia memiliki kekhasan yang tiada duanya karena keterkaitan-

nya dengan visi dan misi negara Republik Indonesia tercinta. Visi atau cita-cita yang hendak dicapai bangsa melalui pernyataan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 adalah sebagaimana yang tercantum dalam kalimat terakhir dari alinea kedua Pembukaan UUD 1945 yaitu : *negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*. Secara lebih rinci yang dimaksud dengan negara Indonesia yang merdeka adalah Indonesia yang bebas dari segala bentuk penjajahan, baik antarmanusia maupun antar bangsa, baik sebagai obyek maupun sebagai subyek. Yang dimaksud negara Indonesia yang bersatu adalah Indonesia yang memiliki kesatuan wilayah yang utuh sebagai ruang hidup seluruh bangsa, terjalin dan berkembangnya interkoneksi yang harmonis dan sinergis antar setiap komponen bangsa dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki kadar solidaritas sosial yang tinggi antar berbagai komponen bangsa. Yang dimaksud negara Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang memiliki pemerintahan yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan negara Indonesia yang adil dan makmur adalah Indonesia

yang mampu menjamin terpeliharanya hak-hak setiap warganya dan mencegah terjadinya kesenjangan dalam setiap aspek kehidupan bangsa, di samping Indonesia yang mampu menyediakan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar sesuai standar yang layak bagi kemanusiaan seluruh warganya. Adapun misi negara atau yang biasa disebut sebagai tujuan nasional adalah sebagaimana yang tercantum sebagai kalimat-kalimat awal dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu: *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial* Secara lebih rinci misi negara tersebut dapat dikategorikan atas empat hal yaitu: (1) melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan kata lain 'wawasan kebangsaan Indonesia' menuntut komitmen fisik, psikologis, sosial dan kultural seluruh anak bangsa yang tinggi dan berdimensi sangat luas yang men-

cakup totalitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.

Implementasi Pancasila dalam Menumbuhkembangkan Wawasan Kebangsaan Indonesia

Diktum pertama Ketetapan MPR-RI Nomor XVIII/MPR/1998 berbunyi: *Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara*. Dua hal penting yang terkandung dalam diktum pertama Ketetapan MPR-RI tersebut adalah: (1) Bahwa Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (2) Bahwa sebagai dasar negara harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Pancasila adalah sekaligus juga sebagai ideologi bangsa, sebagai falsafah bangsa, sebagai jati diri dan identitas diri bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI di Jakarta, Pancasila adalah dasar filosofis dari negara Indonesia yang pada waktu itu masih akan didirikan.

Pancasila merupakan suatu landasan filosofis atau *philosophische grondslag* atau *weltanschauung* dari didirikan dan dikembangkan negara Indonesia oleh dan untuk bangsa Indonesia. Perumusannya sebagai Pancasila memang baru diusulkan pada tanggal 1 Juni 1945 (oleh Ir. Soekarno) tetapi sebenarnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah lama ada dan berakar kuat dalam kehidupan masyarakat pendukungnya di Indonesia. Pancasila digali dari dalam bumi ibu pertiwi (tanah air) sendiri sebagai satu kesatuan wilayah dan komunitas penghuninya secara menyeluruh. Pancasila tidak digali atau dinyatakan berasal dari salah satu bagian wilayah dan penduduk atau suku bangsa tertentu di Indonesia. Dalam pidato pengusulan tersebut Ir. Soekarno selalu membandingkan Pancasila dengan pandangan-pandangan filosofis sejenisnya di berbagai penjuru dunia, baik Pancasila sebagai satu kesatuan pandangan yang utuh maupun dalam uraian tentang bagian atau sila persilanya.

Dalam konteks menumbuhkan Waswasan Kebangsaan Indonesia implementasi Pancasila baik sebagai dasar negara dan ataupun sebagai pandangan hidup bangsa akan ditekankan pada keterkaitannya

dengan fenomena budaya masyarakat Indonesia yang sangat pluralistik. Masalah keanekaragaman budaya atau multikulturalisme ini semakin dirasakan pentingnya bagi bangsa Indonesia di era reformasi dewasa ini dan lebih-lebih dalam menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan di masa depan. Kenyataan masyarakat Indonesia yang multi-etnik atau multikultural dewasa ini yang bukan hanya harus diakui keberadaannya tetapi bahkan harus diberdayakan, sejalan dengan tuntutan paradigma baru pembangunan nasional yang lebih *human* atau *people centered* menggantikan paradigma pembangunan yang lebih *economic* ataupun *political centered* seperti yang berlaku pada masa-masa terdahulu. Pentingnya pendekatan multikulturalisme terkait juga dengan jargon-jargon berdasar realita politis di bawah koridor *civil society* dan *asas pluralitas budaya* sebagai pilar-pilar penyangga reformasi total yang dikumandangkan anak bangsa selama sepuluh tahun terakhir. Dalam pada itu menurut Sastrapratedja (2005) ada lima alasan mengapa multikulturalisme menjadi penting untuk masa depan Indonesia yaitu: (1) Dewasa ini hampir semua masyarakat semakin menjadi multikultural, dan pada saat yang sama men-

jadi lebih mampu menyerap budaya lain atau semakin menjadi lebih terbuka. Lebih-lebih dalam konteks globalisasi, kontak antar budaya menjadi lebih mudah karena perkembangan media komunikasi yang cepat. (2) Kemajemukan budaya memperluas lingkup pilihan dan kebebasan. (3) Kebudayaan membentuk identitas kelompok, tetapi selalu dalam referensi dengan 'yang lain', maka harus ada penerimaan dan pengakuan kepada 'yang lain'. (4) Kemajemukan budaya juga memperluas imajinasi dan simpati, mengembangkan sikap toleran, mendorong kompetisi yang sehat antara berbagai cara hidup, menambah warna dan memperkaya kehidupan sosial serta memperdalam apresiasi kita terhadap hakekat dan kemungkinan eksistensi manusia. (5) Tidak ada kebudayaan manapun yang mampu mewujudkan semua nilai; oleh karena itu berbagai budaya yang berbeda akan saling melengkapi dan mendorong untuk berefleksi diri.

Salah seorang bapak bangsa Indonesia, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa Pancasila merupakan saripati atau intisari dari kebudayaan Indonesia secara nasional. Pancasila merupakan resultante dari nilai-nilai yang diakui dan diyakini kebenarannya oleh masing-masing

warga negara yang sangat beranekaragam latar belakang kebudayaan lokal atau kebudayaan etnisnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan terus menyinari dan berfungsi sebagai simbol serta motor pengikat yang memiliki kekuatan integratif di antara masyarakat Indonesia yang multietnik. Dalam hal ini secara konseptual nilai-nilai Pancasila berfungsi dan berperan sebagai kekuatan yang memusat (*sentripetal*) bagi masyarakat Indonesia yang pluralistis. Dalam proses implementasi nilai-nilai Pancasila yang berorientasi pada pendekatan multikulturalisme, akan bertemu antara nilai-nilai Pancasila sebagai faktor pengikat integrasi bangsa yang memiliki daya atau kekuatan memusat (*sentripetal*) tersebut dengan berbagai fenomena praksis nyata di lapangan berdasarkan latar belakang budaya etnik yang justru memiliki daya atau kekuatan menyebar (*sentrifugal*). Keseimbangan antara kedua kekuatan yang memusat dan yang menyebar inilah yang pada hakikatnya akan menumbuhkan dan menyuburkan Wawasan Kebangsaan Indonesia yang diliputi semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Melalui strategi implementasi Pancasila yang mempertemukan dan mensinergiskan antara kekuatan sistem nilai yang memu-

sat (*sentripetal*) dan kekuatan unsur-unsur aktivitas dan perilaku nyata yang menyebar (*sentrifugal*) dari Pancasila diharapkan dapat berkembang proses masyarakatan sekaligus kebudayaan dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa secara menyeluruh. Pada gilirannya Wawasan Kebangsaan Indonesia akan selalu terjaga keberadaan dan keberlangsungannya sesuai tuntutan dan tantangan jaman. Wahana yang digunakan adalah 'budaya dialog'. Melalui budaya dialog akan tercipta proses belajar dalam kebersamaan dan kesetaraan budaya (*cultural equality*). Selanjutnya dalam kerangka masyarakat Indonesia yang multietnik sangat diperlukan adanya 'dialog budaya' baik secara horizontal maupun secara vertikal. Melalui pendekatan *budaya dialog* dan *dialog budaya* sebagai gerakan masyarakat yang berkesinambungan tersebut diharapkan implementasi Pancasila dalam menumbuhkan Wawasan Kebangsaan Indonesia akan berlangsung efektif, sejalan dengan gerak perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh warga masyarakat Indonesia dalam keseimbangan dan dinamis.

Bahan Rujukan Terbatas

- Martodirdjo, Haryo S. 2005. *Pemasyarakatan Nilai-nilai Pancasila Guna Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dalam rangka Pembangunan Nasional*, Taskap KSA XIII Lemhannas R.I.
- _____. 2005. *Aktualisasi Pancasila dalam Pendekatan Sosial Budaya*, makalah Semiloka Aktualisasi Pancasila di Bandung, tgl. 29 September 2005, diselenggarakan oleh: Unpad - Pemda Jabar - Lemhannas R.I.
- _____. 2006. *Pancasila dalam menumbuhkan Wawasan Kebangsaan*, ceramah tgl. 27 Februari 2006, KSA XIV Lemhannas R.I.
- Poespowardojo, Soerjanto. 2005. *Aktualisasi Pancasila dalam Perspektif Filosofis Humanitor*, Makalah Simposium Aktualisasi Pancasila, Bandung, tgl 2 Mei 2005, diselenggarakan oleh: Unpad - Pemda Jabar - Lemhannas R.I.
- Sastrapratedja, M. 2005. *Pancasila sebagai Prinsip Humanisasi Masyarakat: Konteks-tualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya*, Makalah Seminar Nasional Mengenang Satu Abad Kelahiran Prof. Notonagoro, Yogyakarta: Fak. Filsafat UGM

- Sekretariat Jenderal MPR R.I. 2005. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*
- Sekretariat Negara R.I. 1995. *Risalah Sidang BPUPKI*
- Tim Sosialisasi Wawasan Kebangsaan. 2004. *Himpunan Modul Sosialisasi Wawasan Kebangsaan*, Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden R.I.
- Yudhoyono, Susilo B. 2004. *Menuju Negara Kebangsaan Modern*, Jakarta: Brighten Press